

## ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI

Pauzan <sup>1)</sup>

Universitas Muhammadiyah Jambi <sup>1)</sup>

[Pauzanbungo27@gmail.com](mailto:Pauzanbungo27@gmail.com) <sup>1)</sup>

Yunie Rahayu <sup>2)</sup>

Universitas Muhammadiyah Jambi <sup>2)</sup>

[Yunierahayu@umjambi.ac.id](mailto:Yunierahayu@umjambi.ac.id) <sup>2)</sup>

Ali Fahmi <sup>3)</sup>

Universitas Muhammadiyah Jambi <sup>3)</sup>

[Alifahmi1969@gmail.com](mailto:Alifahmi1969@gmail.com) <sup>3)</sup>

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu (time series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,463 menunjukkan bahwa 46,3% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum dan jumlah penduduk, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya bergantung pada penetapan upah minimum dan dinamika kependudukan, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.*

**Kata kunci : Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Kemiskinan**

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali di jumpai dalam kehidupan bersosial. kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas,2002). Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek yaitu: (1)aspek primer,yaitu berupa miskin aset ( harta ),organisasi politik,

pengetahuan dan keterampilan (2) aspek sekunder,yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial,sumber-sumber keuangan dan informasi ( Lincoln,2010:299 )

Kemiskinan tetap menjadi persoalan sentral dalam pembangunan karena berdampak langsung pada kualitas hidup, akses layanan dasar, dan produktivitas ekonomi. Secara konseptual, kemiskinan dapat diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (garis kemiskinan) sehingga keluarga yang berada di bawah garis tersebut mengalami keterbatasan pada pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Ariwibowo, 2016).

Kemiskinan merupakan persoalan individu masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan rendahnya kualitas sumberdaya yang dimiliki, Upah minimum yang tidak sesuai biaya hidup, serta meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi daya saing dalam berbagai sektor kebutuhan, terutama untuk mendapatkan pekerjaan (Sari, 2021).

Kemiskinan tetap menjadi isu sentral dalam pembangunan daerah karena berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan kapasitas ekonomi masyarakat. Di tingkat provinsi, variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural seperti tingkat upah, besaran dan komposisi penduduk, serta kesempatan kerja, kajian empiris menunjukkan hubungan yang kompleks antara upah minimum, pengangguran, dan kemiskinan (Karimi et al., 2023; Mahsunah, 2022).

Upah minimum pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang layak. Ketika upah minimum ditetapkan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan hidup, hal ini dapat membantu rumah tangga miskin meningkatkan daya beli dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Namun, efek positif ini tidak selalu merata karena sangat bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja. Jika lapangan kerja di sektor formal terbatas, kenaikan upah justru bisa membuat sebagian perusahaan menekan jumlah tenaga kerja dan mendorong pekerja ke sektor informal yang upahnya lebih rendah. Selain itu, faktor demografi juga berperan penting. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diiringi penciptaan lapangan kerja memadai akan meningkatkan persaingan dalam pasar kerja dan menambah beban ekonomi, sehingga potensi penurunan kemiskinan dari kebijakan upah minimum bisa berkurang.

Tekanan demografis seperti pertumbuhan penduduk atau dominasi kelompok usia tidak produktif dapat menambah beban pelayanan sosial dan menekan peluang kerja, sehingga memperburuk kerentanan terhadap kemiskinan. Dengan jumlah penduduk yang terus berubah dan pola migrasi internal, perencanaan kebijakan perlu mempertimbangkan aspek demografi agar intervensi seperti penargetan program bantuan sosial atau pelatihan keterampilan lebih tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang.

Provinsi Jambi menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Pada tahun 2024, jumlah penduduk tercatat mencapai 3.724.300 jiwa, dengan sekitar 272.700 orang (7,32% dari total populasi) masih berada dalam kategori miskin. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan sebesar Rp 3.037.122 (berdasarkan data lokal). Perpaduan antara angka kemiskinan dan besaran UMP tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan hidup layak dengan kemampuan pendapatan sebagian rumah tangga, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan di tingkat provinsi.

Jika dibandingkan dengan provinsi di sekitarnya, tingkat kemiskinan Jambi (7,32%) masih lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan (10,68%) namun lebih tinggi dari Sumatera Barat (5,92%) dan Riau (6,03%) (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan di Jambi relatif moderat, struktur ekonomi dan kesempatan kerja di provinsi ini masih belum cukup kuat untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah dominasi sektor informal dan rendahnya tingkat upah di luar industri besar, yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antarwilayah di dalam provinsi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hubungan yang beragam antara upah minimum, jumlah penduduk, dan kemiskinan. Sudirman & Andriani (2017) menemukan bahwa kenaikan upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, meskipun pengaruhnya kecil. Sementara penelitian oleh Alliyah et al. (2024) di Sumatera Utara menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan ketika disertai peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berbeda dengan hasil tersebut, studi Putri &

Putri (2021) mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengurangan kemiskinan dibandingkan kebijakan upah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya ketidak konsistenan empiris yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks Provinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang dan data empiris lokal tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2015–2024. Dengan memanfaatkan data sekunder dari BPS dan dataset lokal, penelitian akan menerapkan analisis deskriptif dan regresi linier berganda untuk menilai pengaruh simultan dan parsial kedua variable dengan tujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus untuk pengurangan kemiskinan di tingkat provinsi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel secara numerik, sedangkan aspek deskriptif dimanfaatkan untuk menampilkan perkembangan variabel penelitian sepanjang periode observasi. Data yang dianalisis berupa data sekunder berbentuk deret waktu (time series) tahun 2015–2024 yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi serta data tambahan hasil olahan peneliti. Variabel penelitian terdiri dari upah minimum provinsi dan jumlah penduduk sebagai variabel bebas, sementara variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan yang direpresentasikan melalui jumlah penduduk miskin.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan upah minimum, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2015–2024. Tahap kedua menggunakan analisis kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- $Y$  = Jumlah penduduk miskin
- $X_1$  = Upah minimum provinsi
- $X_2$  = Jumlah penduduk
- $\alpha$  = konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi
- $\varepsilon$  = error term

Untuk menguji validitas model, penelitian ini menerapkan beberapa uji statistik, antara lain uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji t untuk menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial, serta uji F untuk menguji pengaruh simultan. Selain itu, dilakukan juga uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Seluruh proses analisis data dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS dan Microsoft Excel.

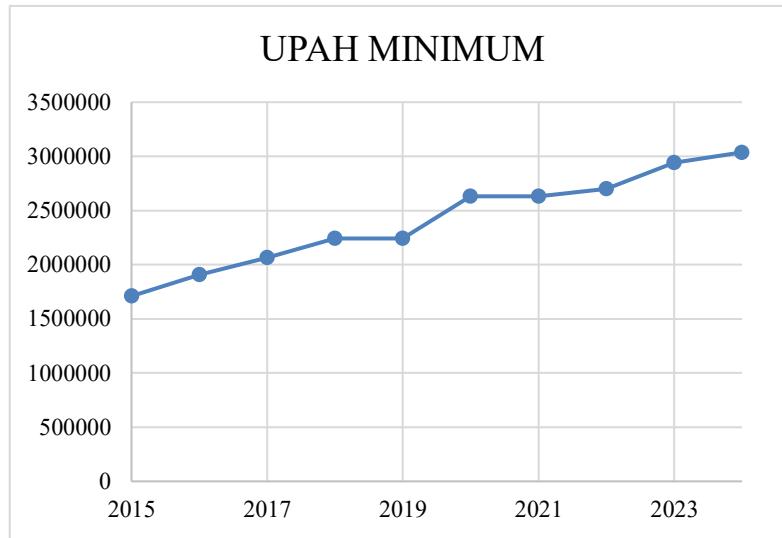
## HASIL PENELITIAN

### 1. Analisis Deskriptif

#### A. Perkembangan Upah Minimum

Upah minimum di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024 mengalami tren yang cenderung meningkat, meskipun tidak setiap tahun naik secara konsisten. Dari Rp 1,71 juta pada 2015, upah minimum naik menjadi Rp 3,03 juta pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kebijakan penyesuaian upah dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut teori ekonomi tenaga kerja yang dijelaskan Mankiw (2006), upah minimum ditetapkan untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang lebih baik. Namun, peningkatan upah minimum tidak selalu berdampak positif jika tidak diimbangi dengan kemampuan dunia usaha. Hal ini terlihat pada tahun 2019 dan 2021 ketika upah minimum stagnan, yang bisa dipahami sebagai upaya pemerintah menjaga stabilitas usaha di tengah kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Dengan demikian, meskipun upah minimum di Jambi terus meningkat hampir dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dampaknya terhadap pengentasan

kemiskinan tetap bergantung pada struktur pasar kerja dan daya serap tenaga kerja formal di daerah tersebut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024 (diolah)

Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi dalam kurun waktu 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun terdapat periode stagnasi. Pada tahun 2015, UMP ditetapkan sebesar Rp 1.710.000. Kemudian terjadi peningkatan bertahap setiap tahun hingga mencapai Rp 2.243.718 pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 UMP Jambi tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp 2.243.718. Kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional dan pertimbangan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sektor usaha. Selanjutnya, pada tahun 2020 UMP meningkat cukup tajam menjadi Rp 2.630.162, namun pada tahun 2021 kembali mengalami stagnasi akibat dampak pandemi COVID-19 yang memukul aktivitas perekonomian. Setelah kondisi ekonomi mulai pulih, UMP Jambi kembali meningkat secara konsisten, yaitu Rp 2.698.940 pada tahun 2022, Rp 2.943.033 pada tahun 2023, hingga mencapai Rp 3.037.122 pada tahun 2024. Secara kumulatif, dalam periode sepuluh tahun, UMP Jambi naik sekitar 77,7%. Kenaikan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga daya beli pekerja, meskipun kebijakan upah tidak selalu bergerak seiring dengan

dinamika kebutuhan hidup layak maupun pertumbuhan produktivitas di sektor formal.

### B. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi

Secara umum, pertumbuhan penduduk memiliki dua sisi: di satu sisi dapat meningkatkan tenaga kerja produktif, tetapi di sisi lain jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja akan menjadi beban ekonomi. Kondisi di Jambi mencerminkan tantangan tersebut. Pertumbuhan penduduk yang rata-rata 0,9% per tahun selama sepuluh tahun terakhir berarti pemerintah perlu memperhatikan penyediaan lapangan kerja, infrastruktur pendidikan, dan layanan sosial. Dengan kata lain, peningkatan jumlah penduduk di Jambi tidak bisa hanya dipandang sebagai tambahan kuantitas, tetapi harus diikuti oleh peningkatan kualitas dan kesempatan ekonomi agar tidak mendorong naiknya angka kemiskinan.



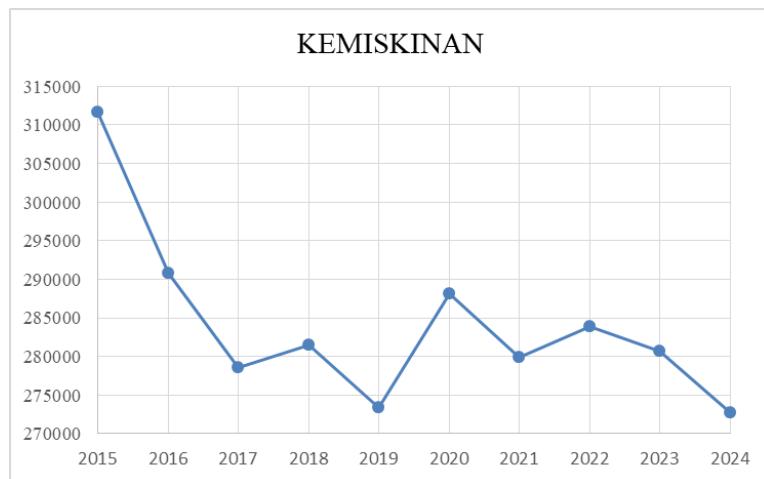
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024 (diolah)

Jumlah penduduk Provinsi Jambi selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang umumnya meningkat, namun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Pada 2015, jumlah penduduk tercatat sebesar 3.402.052 jiwa. Angka ini terus bertambah dari tahun ke tahun, mencapai 3.624.579 jiwa pada 2019, yang berarti ada tambahan sekitar 222 ribu jiwa dalam lima tahun. Pertumbuhan penduduk ini mencerminkan dinamika demografi di Jambi yang masih relatif positif, baik dari sisi kelahiran alami

maupun migrasi. Tahun 2020, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 3.677.894 jiwa. Akan tetapi, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 3.548.228 jiwa, bahkan terus berlanjut pada tahun 2022 hingga menyentuh angka 3.363.100 jiwa. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan metode pencatatan data kependudukan atau dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perpindahan penduduk, tingkat kematian yang meningkat, serta berkurangnya laju migrasi masuk. Setelah periode tersebut, jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan, yaitu 3.633.200 jiwa pada 2023 dan mencapai 3.724.300 jiwa pada 2024.

### C. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Jambi

Dalam teori pembangunan, kemiskinan dipandang sebagai masalah multidimensi, bukan hanya sekadar rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Todaro & Smith, 2011). Dari perspektif ini, penurunan kemiskinan di Jambi meskipun positif, tetap menghadapi tantangan karena kelompok miskin sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan menurunkan kemiskinan di Jambi belum sepenuhnya stabil, dan masih memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan pendapatan, pemerataan kesempatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024 (diolah)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi secara umum menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang, meskipun pergerakannya tidak selalu stabil dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 311,57 ribu jiwa, lalu berkurang cukup signifikan hingga mencapai 273,37 ribu jiwa pada 2019, atau turun sekitar 38 ribu jiwa (12,2%) dalam lima tahun. Penurunan ini erat kaitannya dengan perbaikan kondisi ekonomi makro, meningkatnya jangkauan program bantuan sosial, serta stabilitas ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik menjadi 288,10 ribu jiwa akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, hilangnya pekerjaan terutama di sektor informal, serta turunnya daya beli masyarakat. Setelah itu, jumlah penduduk miskin cenderung menurun kembali walaupun masih mengalami fluktuasi: 279,86 ribu jiwa pada 2021, sedikit naik menjadi 283,82 ribu jiwa di 2022, turun lagi menjadi 280,68 ribu jiwa pada 2023, dan akhirnya mencapai 272,70 ribu jiwa pada 2024. Dengan demikian, selama periode sepuluh tahun, jumlah penduduk miskin di Jambi berkurang hampir 39 ribu jiwa. Meskipun demikian, laju penurunan ini tergolong lambat dan menunjukkan bahwa kelompok rentan masih sangat peka terhadap guncangan ekonomi. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dirancang secara berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia..

#### D. Uji asumsi klasik

**Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Ket
Upah Minimum	0,612	1,634	Tidak terjadi multikolinearitas
Jumlah Penduduk	0,612	1,634	Tidak terjadi multikolinearitas

*Sumber: SPSS 25 (data diolah)*

### Penjelasan:

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum dan Jumlah Penduduk masing-masing memiliki nilai **Tolerance sebesar 0,612** dan nilai **Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,634**. Nilai tersebut memenuhi kriteria uji multikolinearitas, yaitu Tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, sehingga masing-masing variabel dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kemiskinan secara independen.

**Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)**

Model	Durbin-Watson	Kriteria	Ket
1	1,842	1,5 < DW < 2,5	Tidak terjadi autokorelasi

*Sumber: SPSS 25 (data diolah)*

### Penjelasan:

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara residual pada satu periode dengan periode lainnya, terutama pada data runtun waktu (time series). Pengujian dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson. Hasil uji menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar **1,842**, yang berada dalam rentang bebas autokorelasi, yaitu antara 1,5 hingga 2,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi dan memenuhi asumsi independensi residual.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)**

Variabel	K-S Z	Asymp. Sig.	Ket
Residual	0,603	0,861	Data berdistribusi normal

*Sumber: SPSS 25 (data diolah)*

### Penjelasan:

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 25, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar **0,861**, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

#### E. Hasil Analisia Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda memberikan gambaran seberapa besar dan bagaimana arah hubungan masing-masing variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Misalnya, dalam penelitianmu, variabel independen adalah *upah minimum* dan *jumlah penduduk*, sedangkan variabel dependennya adalah *kemiskinan*. Melalui regresi berganda, peneliti dapat menilai apakah kedua faktor tersebut secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

**Tabel 1 Regresi Linear Berganda Melalui Program SPSS**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	427430.765	103578.693		4.127	.004
	Upah Minimum	-.010	.009	-.413	-1.218	.263
	Penduduk	-.033	.032	-.352	-1.036	.334

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : SPSS 25 Data diolah

#### Penjelasan:

Pada tabel koefisien, nilai konstanta sebesar **427.430,765** dengan signifikansi 0,004. Ini berarti bahwa jika variabel upah minimum dan jumlah penduduk dianggap konstan, maka nilai kemiskinan diperkirakan sebesar 427,43 ribu jiwa. Selanjutnya, variabel **Upah Minimum memiliki koefisien regresi -0,010** dengan nilai signifikansi 0,263 ( $>0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (kenaikan UMP cenderung menurunkan jumlah penduduk miskin), tetapi pengaruh tersebut **tidak signifikan secara statistik**. Demikian juga, variabel **Jumlah**

Penduduk memiliki koefisien regresi **-0,033** dengan signifikansi 0,334 ( $>0,05$ ). Artinya, jumlah penduduk juga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, namun tidak signifikan.

## 2. ANOVA (Uji F)

Tabel **ANOVA** (Analysis of Variance) dalam regresi berganda digunakan untuk menguji signifikansi model secara simultan (uji F). Artinya, ANOVA menjawab pertanyaan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 2 Uji Simultan (Uji-F) ANOVA**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	521570455.908	2	260785227.954	3.012	.114 <sup>b</sup>
	Residual	605992770.992	7	86570395.856		
	Total	1127563226.900	9			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Penduduk, Upah Minimum

Sumber : SPSS 25 Data diolah

### Penjelasan:

Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai **F hitung = 3,012** dengan nilai signifikansi (**Sig. = 0,114**). Karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka model regresi secara simultan dinyatakan **tidak signifikan**. Artinya, secara bersama-sama variabel upah minimum dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2015–2024. Walaupun demikian, nilai F yang relatif mendekati signifikan menunjukkan adanya kecenderungan hubungan, hanya saja pada taraf kepercayaan 95% belum cukup kuat untuk menarik kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh simultan terhadap kemiskinan.

## 3. Model Summary

Tabel **Model Summary** memberikan informasi umum mengenai kekuatan dan kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 2 Uji Model Summary**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 <sup>a</sup>	.463	.309	9304.321

a. Predictors: (Constant), Penduduk, Upah Minimum

*Sumber : SPSS 25 Data diolah*

**Penjelasan:**

Hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar **0,680**, yang berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen (Upah Minimum dan Jumlah Penduduk) dengan variabel dependen (Kemiskinan). Nilai **R Square = 0,463** menunjukkan bahwa sekitar **46,3% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen**, yaitu upah minimum dan jumlah penduduk. Sementara itu, **Adjusted R Square = 0,309** menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen turun menjadi 30,9%. Dengan demikian, masih terdapat 53,7% variasi tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, misalnya faktor pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau sektor informal.

Tidak signifikannya pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kenaikan UMP belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh struktur pasar kerja di Jambi yang masih didominasi oleh sektor informal, di mana sebagian besar pekerja tidak menerima upah sesuai standar UMP. Dengan demikian, kenaikan upah minimum hanya berdampak pada sebagian kecil tenaga kerja formal dan belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sabyan dan Widayanti (2022) serta Sudirman dan Andriani (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum tidak secara langsung menurunkan kemiskinan apabila tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja formal.

Selain itu, variabel jumlah penduduk juga menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi belum sepenuhnya menjadi beban ekonomi, namun juga belum mampu menjadi faktor pendorong pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penciptaan lapangan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri et al. (2023) yang menemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan tanpa adanya peran variabel intervening seperti penyerapan tenaga kerja.

Perbedaan hasil dengan penelitian Hutabarat et al. (2023) di Jawa Tengah yang menemukan pengaruh signifikan upah minimum terhadap kemiskinan dapat dijelaskan oleh perbedaan struktur ekonomi dan tingkat industrialisasi antar daerah. Provinsi dengan basis industri yang kuat cenderung lebih responsif terhadap kebijakan upah dibandingkan daerah yang sektor informalnya lebih dominan seperti Provinsi Jambi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Data tahun 2015–2024 memperlihatkan bahwa meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) mengalami kenaikan dan jumlah penduduk relatif stabil, angka kemiskinan belum dapat ditekan secara signifikan. Jumlah penduduk miskin memang menurun dari sekitar 311 ribu jiwa pada 2015 menjadi 272 ribu jiwa pada 2024, namun laju penurunannya cenderung lambat serta mudah terganggu oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan terkait upah dan faktor demografi saja belum cukup kuat untuk dijadikan instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hasil uji regresi berganda memperlihatkan bahwa variabel upah minimum maupun jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, kenaikan upah dan pertumbuhan penduduk berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak

signifikan secara statistik, baik secara parsial maupun simultan. Model penelitian ini hanya mampu menjelaskan 46,3% variasi kemiskinan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti aspek pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, hingga kualitas lapangan kerja. Temuan ini mendukung pandangan dalam teori pembangunan yang menegaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu atau dua variabel ekonomi saja.

Dengan demikian, upaya mengurangi kemiskinan di Provinsi Jambi membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh. Penetapan upah minimum tetap perlu disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak, namun harus dibarengi dengan strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta program perlindungan sosial yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Di samping itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan layanan kesehatan agar pertumbuhan penduduk dapat menjadi aset pembangunan, bukan sekadar beban ekonomi. Kolaborasi lintas sektor inilah yang berpotensi mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Permana, D. Khaira Ramdhanni, dan R. Firmansyah, "Analisis Dampak Kenaikan Ekspor Tembakau Indonesia Terhadap Beacukai Negara," *J. Penelit. Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 1, hal. 1177–1184, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
2. P. Perdana, "Analisis Pengaruh Harga Internasional, Nilai Tukar, Dan Gdp Perkapita Amerika Serikat Terhadap Nilai Ekspor Tekstil Indonesia Ke Amerika Serikat," *JITAA J. Int. Taxation, Account. Audit.*, vol. 3, no. 1, hal. 80–95, 2024, doi: 10.62668/jitaa.v3i1.1170.
3. Andriyani dan T. W. Syahputra, "Pengaruh Ekspor Ikan Tongkol/Tuna Indonesia Ke Jepang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dengan Model Dinamis Regression," *J. Ekon. Reg. Unimal*, vol. 4, no. 1, hal. 15, 2021, doi: 10.29103/jeru.v4i1.4815.
4. M. Alliyah, P. Ariwibowo, dan M. Nizma, "Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005 - 2022," *Sosio e-Kons*, vol. 16, no. 3, hal. 279, 2024, doi: 10.30998/sosioekons.v16i3.25511.
5. M. Putri dan D. Z. Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia," *Ecosains J. Ilm. Ekon. dan Pembang.*, vol. 10, no. 2, hal. 106, 2021, doi:

- 10.24036/ecosains.11564057.00
6. et al Safitri, "Pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin dengan intervening penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi," *J. Paradig. Ekon.*, vol. 18, no. 4, hal. 2085–1960, 2023.
  7. Purnama Sari, H. Hasugian, dan M. Ikhsan Harahap, "Implikasi Kebijakan Ekspor Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam," *J. Islam. Econ. Financ.*, vol. 1, no. 2, 2023, [Daring]. Tersedia pada: [https://journal.yibri.id/index.php/brijef/](https://journal.yibri.id/index.php/brijief/)
  8. Mubarokah, "The Analysis Of The Export Development Of Indonesian Cinnamon," *Ecoplan*, vol. 3, no. 1, hal. 1–11, 2020.
  9. M. Sabyan dan R. Widyanti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi," *J. Menara Ekon. Penelit. dan Kaji. Ilm. Bid. Ekon.*, vol. 8, no. 3, hal. 311–315, 2022, doi: 10.31869/me.v8i3.3813.
  10. R. T. Ashari dan M. Athoillah, "313 Journal of Development Economic and Social Studies Volume 2 No 2 Tahun 2023," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 2, hal. 313–326, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>
  11. S. Sudirman dan L. Andriani, "Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 1, hal. 148, 2017, doi: 10.33087/ekonomis.v1i1.15.
  12. T. A. S. Hutabarat, M. Fathorrazi, dan M. A. Nasir, "Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021," *J. Ekuilibrium*, vol. 7, no. 1, hal. 1, 2023, doi: 10.19184/jek.v7i1.35051.